

BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data lapangan dan pembahasan, ada beberapa hal yang di garisbawahi sebagai kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, secara umum pemahaman masyarakat atas keberadaan desa wisata cukup baik. Pemahaman masyarakat yang cukup baik ini, terbangun berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan oleh pendahulu secara turun-temurun. Kearifan lokal yang melandasi pemahaman masyarakat atas desa wisata itu adalah falsafah *tri hita karana*. Falsafah *tri hita karana* mengajarkan, agar manusia hidup bahagia, aman, tenteram, dan sejahtera, mereka harus menjaga hubungan yang harmonis dengan Sang Maha Pencipta (*parahyangan*), dengan sesama (*pawongan*), dan dengan alam lingkungan (*palemahan*). Keyakinan masyarakat terhadap falsafah tersebut membentuk pengetahuan lokal untuk selalu menjaga keseimbangan dan keselarasan alam dan lingkungan termasuk lingkungan danau, hutan, dan sawah. Pengetahuan lokal tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan budaya tetap lestari. Namun kenyataannya, mereka tidak mampu menjaga keberlanjutan sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri. Penyebabnya, mereka tidak terlibat dalam kegiatan pengembangan desa wisata.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan tergolong partisipasi semu. Dikatakan semu karena partisipasinya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan rendah. Demikian pula, kewenangan, hak dan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata juga rendah, keterlibatan masyarakat tergolong tinggi hanya pada tahap implementasi. Pada keadaan demikian, tidak dapat dikatakan ada partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Hal ini mengindikasikan, masyarakat lokal masih saja menjadi objek pembangunan, belum menjadi subjek pembangunan.

Faktor penyebab terjadinya partisipasi semu adalah, (1) faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan berkontribusi cukup besar terhadap terjadinya partisipasi semu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemimpin yang ada pada saat ini belum mampu menerapkan konsep kepemimpinan yang *asta brata*, karena (a) belum mampu menggerakkan semangat warga untuk ikut terlibat dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pengawasan pengembangan desa wisata, (b) tidak berpihak pada masyarakat lokal dan belum mampu memberikan kemakmuran kepada warganya, dan (c) tidak adil dan bijaksana karena tidak memberikan kewenangan, hak, dan akses yang luas kepada masyarakat lokal untuk ikut menentukan kebijakan pengembangan desa wisata. Kepemimpinan yang tidak berlandaskan nilai-nilai *asta brata* menyebabkan terjadinya partisipasi semu di Desa Wisata Candikuning dan Jatiluwih. Sebaliknya, kepemimpinan yang berlandaskan konsep kepemimpinan lokal (*asta brata*) ternyata mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat di Desa Wisata

Kukuh. (2) faktor komunikasi. Komunikasi berkontribusi cukup besar terhadap terjadinya partisipasi semu. Ada hambatan dalam proses komunikasi pengembangan desa wisata sehingga (a) informasi terkait pengembangan desa wisata tidak sampai keseluruh lapisan masyarakat, (b) penggunaan media formal yang tidak efektif sebagai media penyalur informasi pembangunan keseluruh lapisan masyarakat, dan (c) tidak adanya interaksi antar pemangku kepentingan sehingga informasi terkait pengembangan desa wisata tidak diterima secara utuh oleh masyarakat. (3) faktor manajemen. Manajemen berkontribusi cukup besar terhadap terjadinya partisipasi semu. Hal ini tercermin dari belum adanya sistem yang memberikan ruang yang aman dan memadai atau belum tersedianya suatu *frame work* bagi proses partisipasi masyarakat. Di samping itu, masih rendahnya kemampuan untuk mengembangkan partisipasi akibat tidak terbiasanya masyarakat melibatkan diri dalam pembangunan. (4) faktor Mutu modal Manusia. Mutu modal manusia berkontribusi terhadap terjadinya partisipasi semu. Artinya, dengan mutu modal yang rendah, individu/masyarakat berpeluang kecil untuk ikut terlibat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, maupun dalam memanfaatkan akses, kewenangan, hak, maupun peluang yang muncul dalam pengembangan desa wisata. (5) faktor sosial-budaya. Faktor sosial-budaya tidak berkontribusi terhadap terjadinya partisipasi semu. Ikatan sosial-budaya dalam sistem *banjar* dan penerapan konsep *ngayah*, *paras-paros*, *salulung sabayantake* memungkinkan (a) setiap anggota masyarakat punya hak, kewenangan, dan akses sama besar dalam menentukan kebijakan program-program pembangunan yang dirancang warga, dan (b) setiap anggota masyarakat

ikut terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan baik dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan program. (6) faktor Motivasi. Motivasi tidak berkontribusi terhadap terjadinya partisipasi semu. Artinya, Masyarakat di desa wisata punya motivasi tinggi untuk meraih kemandirian dalam memanajemen sumber daya pariwisata. Namun, ketiadaan kewenangan, hak, dan akses menyebabkan mereka tidak bisa ikut terlibat dalam keseluruhan tahapan pembangunan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal terutama variabel kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen berpengaruh cukup kuat terhadap partisipasi masyarakat dibandingkan faktor internal. Artinya, ada hambatan struktural yang menyebabkan masyarakat lokal kurang berpartisipasi aktif dalam pengembangan desa wisata. Disamping itu, masih rendahnya kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pariwisata akibat tidak terbiasanya mereka melibatkan diri dalam pengembangan desa wisata.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi yang dibutuhkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. adalah sebagai berikut. *Pertama*, penyesuaian struktural (*structural adjustment*) yang difokuskan pada strategi (a) kebijakan pimpinan yang berpihak pada masyarakat lokal, (b) pengembangan komunikasi yang intensif dengan penggunaan media yang tepat, sehingga informasi pengembangan desa wisata pada seluruh lapisan masyarakat, (c) penerapan konsep *ngayah*, *salulung sabayantake*, dan *paras-paros* dalam pengembangan desa wisata, dan (d) penerapan manajemen berdikari dalam pengembangan desa wisata. *Kedua*, pembangunan kapasitas masyarakat adalah

yang difokuskan pada strategi pembangunan masyarakat (*capacity building*) yang sasarannya adalah (a) meningkatnya kapasitas, peran, dan inisiatif masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pengembangan desa wisata, (b) meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, dan (c) meningkatnya nilai manfaat positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

8.2 Rekomendasi dan Implikasi Kebijakan

Untuk meraih gambaran posisi masyarakat yang ideal sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata diperlukan tindakan sebagai berikut.

Pertama, dalam tataran kebijakan, harus ada kemauan politik pemerintah untuk mengurangi peranannya dalam pengelolaan sumber daya pariwisata dan memberikan peranan yang lebih besar kepada masyarakat dengan membuka ruang dan arena bagi mereka untuk berpartisipasi. Hal ini dapat dilakukan dengan (1) mengikutsertakan masyarakat untuk mendesain sendiri model pariwisata yang dikembangkan melalui pembuatan program-program yang dapat dikerjakan oleh masyarakat lokal, seperti program penataan atraksi wisata, program penataan fasilitas wisata, program pemasaran, dan program pelestarian lingkungan.

Kedua, perlu dibentuk organisasi yang otonom dan mandiri yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan pelibatan masyarakat sebagai unsur badan pengelola objek wisata. Dalam pelaksanaannya dapat dilibatkan beberapa komponen pelaku utama berikut ini. (a) Lembaga adat

atau desa dinas yang intinya merupakan masyarakat lokal secara langsung berperan sebagai pengelola tingkat lokal. Keterlibatan ini bisa diwadahi juga dalam bentuk lembaga desa atau membentuk suatu kelompok swadaya, (b) pihak pemerintah yang memberikan pembinaan dan arahan secara umum. Pihak pemerintah bisa diwakili dinas-dinas terkait pada tingkat provinsi maupun kabupaten, dan (c) Pihak swasta dan pihak-pihak yang tertarik dengan pengembangan kepariwisataan atau pihak-pihak yang terjun dalam bisnis kepariwisataan, misalnya, lembaga swadaya masyarakat, Asosiasi Travel Agent Perhimpunan Hotel dan Restoran, dan perguruan tinggi. Seluruh kegiatan nantinya dapat dikelola oleh lembaga yang bernaung di bawah kelembagaan desa adat atau dinas.

Ketiga, pengelolaan program sebaiknya berpusat pada lembaga yang bernaung di bawah kelembagaan desa *pakraman* sehingga desa *pakraman* melalui banjar adat dapat berperan meningkatkan partisipasi masyarakat utamanya dalam *paruman* adat yang dilakukan secara berkala setiap bulan sekali.